

**KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA
BIDANG PENDIDIKAN DI DESA LAIYA, KECAMATAN CENRANA,
KABUPATEN MAROS**

***SOCIAL POLICY PROGRAM KELUARGA HARAPAN IN THE
EDUCATION IN LAIYA VILLAGE, CENRANA DISTRICT, MAROS
REGENCY***

SKRIPSI

FITRIYANI GAFFAR

E0311 71 003



DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

**KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA
BIDANG PENDIDIKAN DI DESA LAIYA, KECAMATAN CENRANA,
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

FITRIYANI GAFFAR

E0311 71 003



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA BIDANG PENDIDIKAN DI DESA LAIYA, KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

FITRIYANI GAFFAR

E031171003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 14 Juli 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

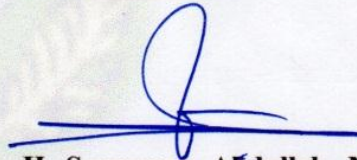
Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si
NIP. 19651016 199002 1 002

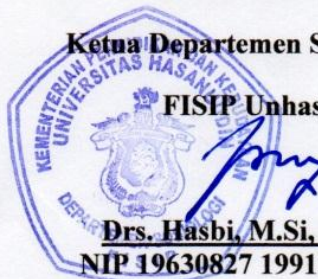
Pembimbing II



Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si
NIP. 19680715 199403 1 004

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi



Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D
NIP 19630827 19911 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Evaluasi Skripsi Pada
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Oleh:

NAMA : FITRIYANI GAFFAR

NIM : E031171003

**JUDUL :KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PADA BIDANG PENDIDIKAN DI DESA LAIYA
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS**

Pada:

Hari / Tanggal: Rabu / 14 Juli 2021

Tempat Ruang Ujian Departemen Sosiologi/Aplikasi Zoom

TIM EVALUASI SKRIPSI

Ketua : Drs. Iqbal Latief, M.Si

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si

(.....)

Anggota : Drs. Arsyad Genda, M.Si

(.....)

: Suryanto, S.Sos, M.Si

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini:

NAMA : FITRIYANI GAFFAR

NIM : E031 17 1003

**JUDUL : KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN PADA BIDANG PENDIDIKAN DI DESA
LAIYA, KECAMATAN CENRANA, KABUPATEN
MAROS**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Juni 2021

Yang Menyatakan



FITRIYANI GAFFAR

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, skripsi ini kupersembahkan untuk insan yang teramat berarti dalam hidup penulis. Teruntuk kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta **Gaffar** dan **Mariani**. Untuk saudara-saudaraku yang tercinta **Erni S.Hum**, **Fadillah Gaffar**, dan **Filzah Gaffar**. Rangkaian kata dalam tulisan ini adalah bukti cinta yang kudedikasikan untuk segenap keluarga yang telah menawarkan uluran tangan dan bantuan moril maupun materil selama penulis menempuh masa studi. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam dalam proses penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, beserta orang-orang yang setia meniti jalannya sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul “Kebijakan Sosial Program Keluarga Harapan pada Bidang Pendidikan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku **Ayahanda Gaffar** dan **Ibunda Mariani** yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan membiayai pendidikan penulis untuk menyelesaikan studinya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Drs. Muh Iqbal Latief, M.Si**, dan **Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si** selaku pembimbing I dan ke-II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan memberikan arahan dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi dan Dr. Ramli AT, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik dalam pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
8. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Sosiologi, khususnya Ibu Ros dan Bapak Pasmudir, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2017 di Jurusan Sosiologi yang telah menjadi saudara seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Kepada sepupu saya Erni, S.Hum, Novita Andriani Putri dan adik saya Nur Fadillah Andriani saya ucapkan terima kasih telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi penulis.
11. Kepada teman-teman saya Andi Ainun Juniarsi Nur, Mizni Zaharani Hilmi, Andi Amirah Humaira Yakub, Andi Nurul Annisa Yudha, Muh Alwi Abdullah dan Islam Faruq Zaini yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada seluruh informan atas kesediaanya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Oleh karena itu segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 27 Juni 2021

Penulis

ABSTRAK

Fitriyani Gaffar, E031 17 1003, dengan judul Skripsi “Kebijakan Sosial Program Keluarga Harapan pada Bidang Pendidikan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros”. Di bawah bimbingan Bapak Iqbal Latief sebagai Pembimbing I dan Bapak Suparman Abdullah sebagai Pembimbing II.

PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan suatu program pemberdayaan yang dibuat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan suatu program kebijakan sosial yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian bantuan, pelayanan kemasyarakatan, dan tunjangan sosial. Dengan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan efek PKH (Program Keluarga Harapan) di bidang pendidikan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Juga untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan pendidikan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Dasar penelitian yang dipakai adalah studi kasus. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan partisipasi pendidikan pada anak Keluarga Penerima Manfaat semakin meningkat, tingkat pekerja anak sudah semakin berkurang, semangat belajar pada anak Keluarga Penerima Manfaat semakin meningkat, dan adanya bantuan lanjutan yaitu pendamping PKH membantu anak-anak KPM untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Universitas serta setiap bulannya diadakan pelatihan keterampilan. Adapun kendala dalam meningkatkan pendidikan KPM yaitu bantuan PKH tidak tepat sasaran, kehadiran anak KPM kurang dari 85%, dan bantuan PKH yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Kebijakan Sosial, Program Keluarga Harapan, Pendidikan

ABSTRACT

Fitriyani Gaffar, E031171003, with the title “Social Policy Program Keluarga Harapan In The Education In Laiya village, Cenrana district, Maros regency”. under the guidance of Iqbal Latief as a supervisor one And Suparman Abdullah as a supervisor two.

Program Keluarga Harapan (The family Hope program) is an empowerment program created to address the problem of poverty in Indonesia. PKH is a social policy program created by the government to improve the quality of life of the community through the provision of assistance, community services, and social benefits. With purpose in this research, which is to know and describe the educational effect of the PKH (the family hope program) in the village of Laiya, Cenrana District, Maros Regency. Also to know the obstacle to improving the education of the KPM (Beneficiary Families) PKH (the family hope program) in the Village of Laiya, Cenrana District, Maros Regency.

This research was conducted in Laiya Village, Cenrana District, Maros Regency. The type of research used is a type of qualitative research that is descriptive. The type of research used is descriptive research type. The research basis used is a case study. The informant determination technique used is purposive sampling technique. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that with the assistance of the Hope Family Program, educational participation in Beneficiary Families children is increasing, the level of child labor is decreasing, the enthusiasm for learning in Beneficiary Families children is increasing, and there is continued assistance, namely PKH facilitators helping KPM children. to continue their education to the University level and every month skills training is held. The obstacles in improving KPM education are that PKH assistance is not right on target, the presence of KPM children is less than 85%, and the PKH assistance provided is not used properly.

Keyword: social policy, Program Keluarga Harapan, education

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian tentang PKH	8
A. Program Keluarga Harapan	8
a. Konsep PKH.....	8
b. Tujuan PKH.....	9
c. Kriteria Penerima PKH.....	10
d. Hak dan Kewajiban KPM PKH.....	11
e. Besaran Bantuan PKH	12
B. Pemberdayaan Masyarakat	13
a. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan masyarakat.....	13
b. Pendekatan Pemberdayaan	15
c. Prinsip Pemberdayaan	16
d. Tahapan Pemberdayaan.....	18

C. Kebijakan Sosial	21
a. Konsep Kebijakan Sosial.....	21
b. Tujuan Kebijakan Sosial.....	25
B. Teori yang di Gunakan	26
C. Kerangka Pikir	30
D. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Tipe dan Dasar Penelitian.....	35
C. Teknik Penentuan Informan	46
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Laiya	41
B. Kondisi Pemerintahan.....	42
C. Kondisi Sosial.....	44
D. Sarana dan Prasarana	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Informan	47
B. Profil Keluarga Penerima PKH di Desa Laiya	49
C. Efek PKH (Program Keluarga Harapan) di Bidang Pendidikan	50
D. Kendala dalam Meningkatkan Pendidikan KMP (Keluarga Penerima Manfaat)	70
E. Tahapan Pemberdayaan pada Masyarakat penerima PKH.....	83
F. Keterkaitan Antara Teori George Homans dengan Hasil Penelitian	85
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 2. 4 Luas Wilayah di Kecamatan Cenrana	43
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Desa Laiya berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4. 4 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Laiya	45
Tabel 5. 4 Tingkat Pendidikan	46
Tabel 6. 4 Sarana dan Prasarana	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Kerangka Pikir	31
Gambar 2. 4 Peta Wilayah Desa Laiya	41

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	93
B. Surat Izin Penelitian dari Provinsi Sulawesi Selatan	94
C. Surat Izin Penelitian dari Kabupaten Maros	95
D. Surat Bukti telah Melaksanakan Penelitian.....	96
E. Dokumentasi	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat urgen di Indonesia kemiskinan, tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi kemiskinan juga banyak terjadi di daerah pedesaan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat berada dalam kehidupan yang serba kekurangan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Rintonga, 2003, p. 1).

Masalah kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Sepertiga dari penduduk di dunia masih hidup dalam garis kemiskinan, hal tersebut sesuai dengan kriteria dari bank dunia bahwa klasifikasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah menggunakan pendapatan per kapita sebesar US\$370 Amerika sebagai tolak ukurnya (Munandar, 2006, p. 228).

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah sosial yang selalu menarik untuk dikaji terus menerus. Masalah kemiskinan sudah ada sejak lama dan masih menjadi masalah besar dalam kehidupan kita saat ini, serta gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh negara Indonesia. Hal ini juga

terjadi karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Kemiskinan juga terjadi karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu sandang, papan, maupun pangan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi kajian dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar dapat hidup mandiri, serta dapat keluar dari permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dimana masyarakat membuat suatu perencanaan untuk memecahkan masalah sosial sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki (Hamid, 2018, p. 10).

PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan suatu program pemberdayaan yang dibuat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan suatu program kebijakan sosial yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian bantuan, pelayanan kemasyarakatan, dan tunjangan sosial. PKH sebagai suatu program kebijakan sosial merupakan upaya pemerintah yang dibuat untuk merespon masalah-masalah sosial di masyarakat khususnya mengatasi masalah kemiskinan, sehingga masyarakat dapat memperoleh

fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial adalah ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon masalah-masalah yang bersifat publik, yaitu untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat (Suharto, 2011, p. 10).

Negara yang pertama kali mengimplementasikan bantuan langsung tunai bersyarat yaitu Brazil, pada tahun 1990-an dengan nama *Bolsa Escola* dan berganti menjadi *Bolsa Familia* atau juga dikenal dengan program *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. *Bolsa Familia* yang diterapkan mempunyai dua hal penting yaitu membantu mengurangi angka kemiskinan serta membantu keluarga berinvestasi pada anak-anak mereka, sehingga dapat memutus siklus transmisi antargenerasi dan mengurangi angka kemiskinan di masa depan. *Bolsa familia* masih dilaksanakan hingga saat ini setelah berhasil membantu 26% penduduk miskin di Brazil. Kesuksesan program ini dalam mengurangi angka kemiskinan membuat beberapa negara ikut menerapkan bantuan langsung tunai bersyarat salah satunya di Indonesia.

Di Indonesia bantuan langsung tunai bersyarat dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH mulai dilaksanakan di 7 provinsi pada tahun 2007 yang diluncurkan pertama kali di provinsi Gorontalo pada Juli 2007 sebagai tahap uji coba yang diharapkan program ini dapat mengurangi angka kemiskinan sampai dan

mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* atau SDGS (Suleman, Syahputra Sanjaya, 2017, p. 90). PKH berfokus pada dua masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas. Jika kesehatan terjamin pendidikan seseorang akan berjalan dengan baik. Dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) yang diambil dari survei SUSENAS 2019 (Survei Sosial Ekonomi Nasional), masih ada terdapat anak-anak yang putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam perkembangan suatu bangsa, masih tingginya angka anak-anak yang putus sekolah dari masyarakat yang kurang mampu dan meningkatnya angka pekerja anak menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada anak, salah satunya adalah penerapan program keluarga harapan. PKH dibidang pendidikan berupaya memberikan motivasi kepada keluarga penerima manfaat untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah dan mendorong anak-anak untuk mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85%.

PKH (Program Keluarga Harapan) di alokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat yang di tentukan. Khusus untuk desa Laiya, Kec, Cenrana Kab, Maros. Jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) pada tahun 2020 berjumlah 284 RTSM (Rumah Tangga Sangat .Miskin) yang tersebar di Desa Laiya. Kecamatan, Cenrana Kabupaten, Maros.

Program ini telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun demikian tidak terlepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Laiya, yakni mengenai kevalidan data kelayakan peserta PKH (Program keluarga Harapan). Masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon pesrta PKH yang di nilai bukan RTSM, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai RTSM tidak terdata atau tidak masuk calon peserta PKH. Artinya pendataan dan penentuan prioritas sasaran dari program ini belum tepat.

Terkait dengan berlakunya PKH (Program Kalurga Harapan) di bidang pendidikan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Maka perlu ada koordinasi dari pihak terkait, agar dalam pelaksanaannya dapat menjangking kelompok sasaran yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Bantuan PKH (Program Kalurga Harapan) ini diharapkan dapat membantu RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros agar dapat mengakses pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **kebijakan sosial program keluarga harapan pada bidang pendidikan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Apa saja efek PKH (Program Keluarga Harapan) di bidang pendidikan pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros?
2. Apa saja kendala dalam meningkatkan pendidikan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan efek PKH (Program Keluarga Harapan) di bidang pendidikan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kendala dalam meningkatkan pendidikan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan nantinya:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan sosial. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Desa Laiya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan kebijakan sosial program keluarga harapan, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH (Program keluarga harapan) merupakan salah satu program pemberdayaan yang di terapkan pemerintah Indonesia, untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH merupakan program yang mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2007 dan berlangsung hingga saat ini. Regulasi tentang Program Keluarga Harapan yaitu tercantum dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Konsep PKH (Program Keluarga Harapan)

Program keluarga harapan merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Program ini merupakan pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin “RTSM” dan penerima program ini diwajibkan mematuhi dan melaksanakan persyaratan serta, ketentuan yang telah ditetapkan. Di negara luar yaitu Amerika Latin, Karibia, Meksiko, Brazil, Jamaika, Honduras, dan Nikaragua. PKH juga dikenal dengan nama “*conditional cash transfers*” program ini banyak diterapkan di beberapa negara karena dianggap mampu mengatasi masalah kemiskinan (Indonesia, 2019) .

Pemerintah Republik Indonesia mulai melaksanakan “BTB” atau Bantuan Tunai Bersyarat pada tahun 2007, dan biasa dikenal dengan nama PKH. Pada awal pelaksanaannya program ini dibuat untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH merupakan kelanjutan dari program subsidi langsung tunai yang di jalankan oleh pemerintah.

Program keluarga harapan memberikan jalan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan ‘faskes’ dan fasilitas layanan pendidikan ‘fasdik’ yang ada disekitar mereka. PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lansia atau lanjut usia. Manfaat PKH yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. PKH juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia “SDM” baik dibidang kesehatan maupun bidang pendidikan.

b. Tujuan Program keluarga harapan

Program keluarga harapan mempunyai tujuan yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Serta meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin “RTSM” (Kemensos, 2020, p. 5). Secara khusus program keluarga harapan mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Membantu meningkatkan status sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin “RTSM”.
- 2) Untuk meningkatkan dan memperbaiki status kesehatan ibu hamil. Ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari Keluarga Sangat Miskin “KSM”.
- 3) Membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi Keluarga Sangat Miskin “KSM”.
- 4) Membantu memperbaiki taraf dan kualitas pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

Tujuan umum dari program keluarga harapan yaitu:

Untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia pada masyarakat penerima bantuan PKH dan untuk merubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

c. Kriteria Penerima PKH

Adapun beberapa kriteria penerima PKH (Program Keluarga Harapan (Kemensos, 2020, p. 15) yaitu:

- 1) Kriteria komponen kesehatan yaitu ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun.
- 2) Komponen Pendidikan yaitu anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sederajat. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts), atau sederajat. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau sederajat.

Dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai 60 tahun ke atas penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

d. Hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH (Kemensos, 2020, p. 16) yaitu:

a. Hak KPM PKH

Hak-hak keluarga penerima manfaat PKH yaitu:

1. Bantuan sosial
2. Pendampingan sosial
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
4. Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai kebijakan pemerintah.

b. Kewajiban KPM PKH

Adapun kewajiban keluarga penerima manfaat PKH yaitu:

1. Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan.

2. Anggota keluarga yang termasuk dalam kategori anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85%.
3. Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
4. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

e. Besaran Bantuan PKH (Indonesia, 2019)

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

- 1) Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
- 2) PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

b. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

- 1) Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
- 2) Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
- 3) SD : Rp. 900.000,-
- 4) SMP : Rp. 1.500.000,-
- 5) SMA : Rp. 2.000.000,-
- 6) Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-

7) Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

B. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan *empowerment*, berasal dari kata *power* yang berarti (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan yaitu menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (Suharto, 2014, p. 57).

Menurut Ife bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan (Ife, 2008, pp. 61–64). Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam membebaskan diri secara fisik dan mental (Suharto, 2014, p. 59)

Beberapa ahli memberikan definisi tentang pemberdayaan:

- Menurut Ife 1995 dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan* (2014:58), pemberdayaan

memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan kurang beruntung.

- Menurut Parsons, et.al.,1994 dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan (2014:58), pemberdayaan merupakan suatu proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya.
- Menurut Swift dan Levin, 1987 dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan (2014:58), pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- Menurut Rappaport 1984 dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan (2014:58), Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana masyarakat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam menciptakan perencanaan dan tindakan kolektif, guna membantu menyelesaikan masalah sosial atau untuk memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di masyarakat. Menurut Robert Chambers

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Menurut Sutikno Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang berada dalam masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukana untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat di definisikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha pemerintah guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengurangi angka kemiskinan.

b. Pendekatan dalam pemberdayaan

Menurut Suharto, 1997 pendekatan dalam pemberdayaan terbagi kedalam beberapa pendekatan (Suharto, 2014, pp. 67–68) yaitu:

1. Pemungkin yaitu suatu pendekatan yang menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus melepaskan masyarakat dari masalah-masalah soial yang dapat menghambat pemberdayaan di masyarakat.
2. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang ada dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan juga harus mampu

menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat guna meningkatkan kemandirian.

3. Perlindungan yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh beberapa kelompok kuat, dan juga mencegah adanya eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok kuat kepada kelompok lemah. Pemberdayaan harus mampu melindungi masyarakat dari diskriminasi dan dominasi yang akan merugikan rakyat kecil.
4. Penyokongan yaitu memberi arahan, bimbingan, dan dukungan agar masyarakat dapat menjalankan peran dan tugas dalam kehidupannya dengan baik. Pemberdayaan harus membantu menyokong masyarakat lemah agar keluar dari masalah-masalah sosial.
5. Pemeliharaan adalah menciptakan kondisi yang kondusif agar tercipta suatu keseimbangan distribusi kekuasaan antara beberapa kelompok dalam masyarakat.

c. Prinsip pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar (Bahri, 2019, pp. 21–23) yaitu:

1. Partisipasi

Pada kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, dan pengawasan program.

2. Sustainable

Dalam prinsip ini masyarakat diarahkan untuk, melestarikan hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan pemberdayaan. Pelestarian ini dilakukan agar masyarakat mampu mengelolanya dengan baik serta dapat meningkatkan perekonomian.

3. Demokrasi

Prinsip ini menginginkan agar masyarakat diberi kesempatan dan keleluasaan untuk menentukan sendiri strategi cara dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

4. Transparansi

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan itu melibatkan beberapa pihak sehingga dalam proses pengelolaan dilakukan transparansi terutama pada bagian keuangan.

5. Akuntabilitas

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa masyarakat harus mengelola sendiri keuangannya, dan pada pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

6. Desentralisasi

Prinsip ini menjelaskan bahwa proses pemberdayaan itu dilakukan tidak hanya terpusat atau tersentralisasi tetapi pemberdayaan itu dilaksanakan harus lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

7. Acceptable

Yaitu prinsip yang mengarahkan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus tepat sasaran dan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat.

8. Menguntungkan

Prinsip ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

9. Direplikasi

Dalam prinsip ini masyarakat diharapkan dapat memperhatikan pengelolaan dana dan pelestarian agar hasilnya dapat digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

d. Tahapan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan dalam masyarakat terbagi tiga tahapan yaitu (Bahri, 2019, pp. 15–17):

1) Penyadaran

Dalam tahapan ini masyarakat yang ingin diberdayakan diberi pencerahan dengan memberi penyadaran bahwa mereka mampu keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

2) Pengkapasitasan

Dalam tahap ini masyarakat diberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Memberikan kapasitas

kepada masyarakat berarti memampukan masyarakat baik dalam konteks individu maupun kelompok.

3) Pemberian daya (*empowerment*)

Pada tahapan ini masyarakat diberikan daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang. Dengan memberikan daya atau kekuasaan diharapkan masyarakat menjadi mandiri baik dari segi pikiran maupun tindakan.

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahapan, yaitu sebagai berikut (Adi, 2008, p. 162):

1. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (assessment): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap formulasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformulasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
6. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun

komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

C. Kebijakan Sosial

a. Konsep kebijakan sosial

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial adalah ketetapan pemerintah yang diciptakan untuk merespon masalah-masalah yang bersifat publik, yaitu untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat (Bessant, Watts, Dalton, dan Smith 2006:4). Kebijakan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu program yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemberian tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Menurut Huttman, kebijakan sosial adalah berisi strategi, tindakan-tindakan, dan perencanaan untuk mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat (Suharto, 2011, pp. 10–11).

Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan sosial mempunyai beberapa fungsi yaitu, fungsi preventif “pencegahan”, kuratif “penyembuhan”, dan pengembangan “*developmental*”. Kebijakan sosial merupakan suatu ketetapan yang dibuat secara kolektif untuk mengatasi

timbulnya masalah sosial ‘fungsi kuratif’ dan mempromosikan kesejahteraan ‘fungsi pengembangan’ sebagai bentuk kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial masyarakatnya (Suharto, 2006). Kebijakan sosial adalah kebijakan kesejahteraan *welfare policy*, yaitu kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok kurang beruntung. Menurut Midgley 2000, kebijakan sosial dibagi menjadi tiga kategori, yaitu program pelayanan sosial, perundang-undangan, dan sistem perpajakan (Suharto, 2011, pp. 10–11)

- Peraturan dan perundang-undangan.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mendapatkan keputusan-keputusan yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan hidup masyarakat. Program Keluarga Harapan di Indonesia di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

- Program pelayanan sosial.

Sebagian besar kebijakan itu diwujudkan serta diimplementasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang terdiri dari bantuan barang, tunjangan uang, perlindungan sosial, perluasan kesempatan, dan bimbingan sosial “konseling, advokasi, dan pendampingan”. Ini dapat di lihat dan di perkuat dengan adanya

Undang-Undang No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- Sistem perpajakan

Pajak merupakan sumber utama dalam pendanaan kebijakan sosial, pajak juga merupakan instrumen kebijakan yang mempunyai tujuan mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi mengenai 5 bidang pelayanan sosial yaitu (Suharto, 2011, pp. 15–20)

1. Jaminan sosial

Jaminan sosial (*social security*) adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan. Di beberapa negara Eropa jaminan sosial umumnya menyangkut asuransi sosial (*social insurance*), yakni asuransi kesehatan, pensiunan, kecelakaan kerja, dan kematian. Di negara lainnya, jaminan sosial mencakup bantuan sosial (*social assistance*), yakni bantuan uang atau barang yang biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa mempertimbangkan kontribusinya. Anak terlantar, jompo terlantar, penyandang cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan sosial.

2. Perumahan

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan

perumahan bagi warganya, khususnya mereka yang tergolong keluarga kurang mampu. Pelayanan perumahan yang disediakan pemerintah adalah perumahan publik atau perumahan sosial.

3. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah memadai. Melainkan pula orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu.

4. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, akademi dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa yang berpotensi dan tidak mampu.

5. Pelayanan sosial personal (*personal social service*)

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang kebijakan sosial yang populer sejak tahun 1960an. Pelayanan sosial ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial (*social care*) di luar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Pertama, pelayanan sosial personal mencakup tiga jenis yaitu perawatan anak yang berkebutuhan khusus seperti anak yang mengalami cacat fisik dan mental. Kedua, perawatan masyarakat yaitu umumnya diberikan oleh dinas atau kantor sosial di Indonesia. Pelayanan umumnya diberikan kepada masyarakat yang mengalami gangguan fisik atau mental yang memerlukan penanganan profesional. Ketiga, peradilan kriminal yaitu memberikan pendampingan kepada pelanggar hukum anak-anak dan pemberian pelayanan psikososial bagi narapidana dan eks-napi yang telah kembali ke masyarakat.

b. Tujuan Kebijakan Sosial (Suharto, 2008)

Kebijakan sosial memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Meminimalisir, mengurangi, dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi.

3. Memperkuat hubungan intrasosial manusia dengan mengatasi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang diakibatkan oleh faktor-faktor internal dan personal maupun eksternal dan struktural.
4. Memperbaiki situasi pada lingkungan sosial maupun ekonomi agar terpenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
5. Untuk memahami dan mengembangkan sumber-sumber yang ada di masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

B. Teori yang di gunakan

1. Teori Pertukaran Sosial Menurut George Homans

Teori pertukaran sosial merupakan teori yang berkembang dalam ilmu sosial yang menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan dan keuntungan. Dari teori pertukaran sosial yang dijelaskan Homans yaitu inti dari teori pertukaran sosial itu berada pada sekumpulan proposisi fundamental. Dalam beberapa proposisi yang dijelaskan setidaknya ada dua individu saling berinteraksi. Menurut teori yang dikemukakan oleh George Homans perilaku sosial sebagai suatu pertukaran kegiatan, yang nyata atau tidak nyata, atau menghargai bahkan dapat merugikan, antar individu. Homans menganggap perilaku sosial merupakan pertukaran aktivitas. Teori pertukaran ini mencoba menjelaskan perilaku sosial dasar berdasarkan imbalan dan biaya (Ritzer, 2012, p. 714).

Teori pertukaran menurut Homans beranggapan pada asumsi bahwa individu melakukan sesuatu karena berharap memperoleh ganjaran atau menghindari sebuah hukuman. Adapun asumsi dari teori ini yaitu interaksi sosial itu hampir sama dengan transaksi ekonomi. Namun bagi teori pertukaran, pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja karena hal-hal yang dipertukarkan merupakan hal yang nyata atau tidak. Homans menjelaskan bahwa dalam teori pertukaran sosial terdapat lima proposisi yaitu (Ritzer, 2012, pp. 719–723):

1. Proposisi sukses

Dalam proposisi sukses George Homans menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh orang, semakin sering tindakan seseorang diberi penghargaan maka semakin mungkin mereka melakukan tindakan itu (Homans, 1974:16). Homans juga menilai bahwa seseorang lebih mungkin meminta nasehat orang lain jika ia memperoleh penghargaan di masa lampau dari nasehat yang bermanfaat itu. Berikutnya, semakin sering seseorang menerima nasehat yang bermanfaat di masa lampau, maka dia akan semakin sering meminta nasehat yang lebih banyak. Dalam setiap tindakan yang dilakukan semakin sering sesuatu tindakan memperoleh ganjaran maka dia akan semakin sering melakukan tindakan itu. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil mencapai sebuah ganjaran, maka ia akan semakin cenderung mengulangi tindakan tersebut.

2. Proposisi stimulus

Proposisi stimulus menjelaskan bahwa jika pada masa lalu terjadi stimuli yang khusus, atau seperangkat stimuli adalah peristiwa dimana tindakan seseorang mendapatkan ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang dengan yang lalu itu, maka akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang hampir sama. Proposisi ini menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima, tingkah laku, atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Sebagai contoh yang diberikan oleh Homans seorang nelayan yang memancing di tempat yang gelap dan mendapatkan seekor ikan maka nelayan ini cenderung untuk mencari ikan lagi di tempat yang gelap karena ada stimulus yang terjadi di masa lampau. Jadi dapat dikatakan bahwa jika seseorang mendapat sebuah ganjaran dari tindakan yang dilakukan dimasa lampau maka akan cenderung seseorang itu tersebut melakukan tindakan ini dimasa yang sekarang.

3. Proposisi nilai

Proposisi nilai menurut Homans, yaitu semakin bernilai hasil suatu tindakan yang dilakukan seseorang, maka semakin cenderung orang tersebut akan melakukan tindakan serupa. Dalam proposisi ini Homans membahas mengenai konsep imbalan dan hukuman. Imbalan merupakan tindakan yang bernilai positif, sedangkan hukuman lebih mengarah kepada nilai negatif.

4. Proposisi kejenuhan dan kerugian

Dalam proposisi kejenuhan dan kekurangan Homans mengatakan bahwa semakin sering seseorang di masa lalu menerima suatu penghargaan, maka semakin kurang bernilai setiap penghargaan yang diterima selanjutnya. Dalam proposisi ini dijelaskan bahwa semakin seseorang menerima sebuah penghargaan dari tindakannya, maka orang tersebut dapat mengalami kejenuhan dengan adanya penghargaan yang diberikan selanjutnya. Homans menjelaskan bahwa kerugian merupakan suatu perilaku hilangnya penghargaan yang diterima karena tidak melakukan jalur-jalur alternatif. Keuntungan dalam pertukaran sosial yaitu lebih besarnya jumlah penghargaan yang diperoleh dibandingkan kerugian yang didapatkan.

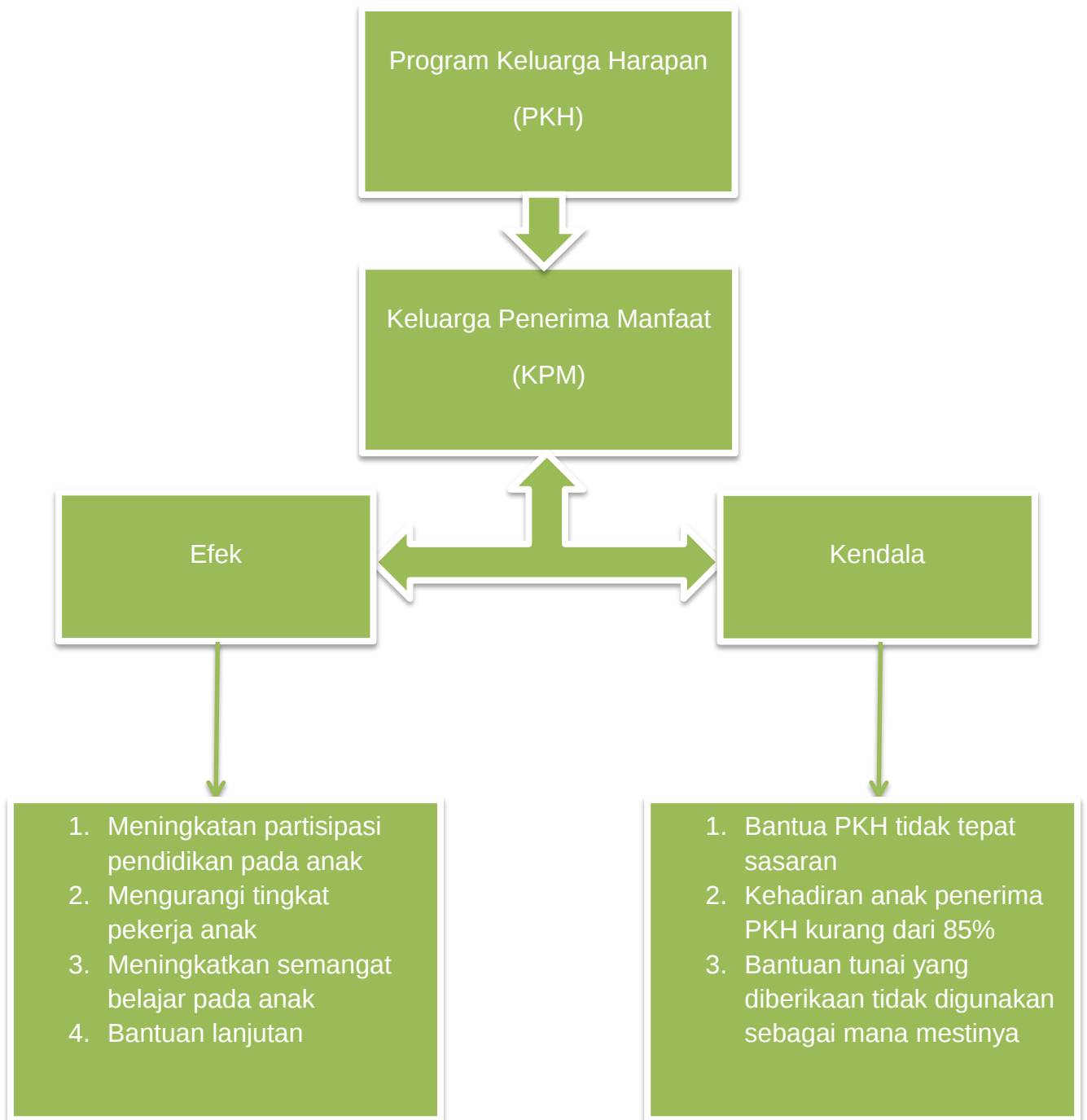
5. Proposisi persetujuan-agresi

Pada proposisi ini Homans menjelaskan bahwa apabila tindakan yang dilakukan seseorang tidak mendapatkan suatu penghargaan, atau bahkan tindakan ini menghasilkan sebuah hukuman yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia akan marah dan mungkin akan berperilaku yang agresif dan hasil dari perilaku tersebut menjadi hal yang sangat berharga baginya. Proposisi ini menganggap bahwa makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut akan marah atau bertindak agresif.

C. Kerangka Pikir

Program keluarga harapan merupakan upaya yang diterapkan pemerintah untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin agar mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan teori George Homans Manusia apa bila melakukan suatu tindakan dan tindakan tersebut menghasilkan suatu penghargaan, maka manusia itu akan melakukan tindakan serupa. Hal ini dapat dikaitkan dengan keluarga penerima manfaat PKH apabila anak-anak mengikuti pembelajaran minimal 85% kehadiran maka siswa sudah memenuhi kewajiban yang ditetapkan pemerintah bagi keluarga penerima manfaat dan mereka mendapatkan bantuan tunai, maka anak-anak semakin giat untuk bersekolah karena adanya bantuan yang diberikan pemerintah apabila siswa/anak memenuhi kewajiban tersebut. Pada skema dibawah merupakan penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan data dan hasil yang diperoleh pada saat penelitian.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



D. Penelitian terdahulu

Tabel. 1. 2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nurfahira Syamsir 2014	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu implementasi PKH bidang pendidikan sudah berjalan dengan baik, karena pelaksanaannya selalu dikawal oleh pendamping yang sudah direkrut oleh pemerintah pusat.
2.	Depi Putri 2014	Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan rumah tangga	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Karakteristik peserta PKH berusia produktif, kualitas pendidikan formal rendah, menganut sistem

		miskin (RTSM) di umbulharjo kota Yogyakarta		keluarga besar, dengan kondisi hunian rumah kurang layak, kondisi ekonomi kurang yang di tandai penghasilan rendah 2. 100% peserta PKH di kecamatan Umbulharjo adalah RTSM/KSM.
--	--	--	--	---

Dari penelitian diatas peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program keluarga harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti melihat apakah efek program keluarga harapan di bidang pendidikan dan bagaimana kendala dalam peningkatan pendidikan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (Syamsir, 2014).

Dari penelitian kedua diatas peneliti ingin melihat Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan rumah tangga miskin (RTSM) di Umbulharjo Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian kali ini peneliti ingin melihat apakah efek program keluarga harapan di bidang pendidikan dan bagaimana kendala dalam peningkatan pendidikan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (Putri, 2014).